



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp. +6221-3850455, Faks. +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor : TI/126/KP.02.02/VI/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Seleksi Terbuka JPT Pratama untuk Jabatan
Inspektur pada PPATK

24 Juni 2019

Kepada Yth.

Daftar Nama Terlampir

di

Tempat

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Inspektur di PPATK dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil di instansi Saudara yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi jabatan dimaksud.

Untuk itu kami mohon bantuan Saudara menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di instansi Saudara mengenai pengisian jabatan Inspektur pada PPATK. Persyaratan dan informasi lainnya dapat dilihat melalui website <https://www.ppatk.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris Utama, *ls*

Rinardi

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
3. Kepala PPATK.

Lampiran Surat

Nomor : T/ 126 /KP.02.02/VI/2019

Tanggal : 24 Juni 2019

DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri.
7. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
27. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
28. Sekretaris Kementerian Pariwisata.
29. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
30. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
31. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
32. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
33. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
34. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
35. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan.
36. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
37. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.
38. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.
39. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
40. Sekretaris Jenderal Dewan Pertimbangan Daerah RI.
41. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
42. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
43. Sekretaris Jenderal Ambudsman RI;
44. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
45. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
46. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
47. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

48. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
49. Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional.
50. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI.
51. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara.
52. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.
53. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara.
54. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
55. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut.
56. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal.
57. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
58. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional.
59. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
60. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
61. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
62. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
63. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
64. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
65. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
66. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional.
67. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional.
68. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional.
69. Sekretaris Lembaga Administrasi Negara RI.
70. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
71. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional.
72. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
73. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional.
74. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
75. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

PEMERINTAH DAERAH

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Sekretaris Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta.
15. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
16. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
29. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
30. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia

Telepon : +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili : +6221-3856809 +6221-3856826

Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : www.ppatk.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR 0 | TAHUN 2019

TENTANG

SELEKSI TERBUKA

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

**DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri dengan ketentuan sebagai berikut :

A. JABATAN YANG LOWONG

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah Jabatan **INSPEKTUR (Eselon IIa)** pada Inspektorat.

B. PERSYARATAN UMUM

- 1) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Usia maksimal 56 tahun pada tanggal 1 Januari 2020;
- 3) Pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (Gol.IV/b);
- 4) Pendidikan paling rendah S-1/D-IV ;
- 5) Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai BAIK pada tahun 2017 dan 2018;
- 6) Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang relevan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 7) Memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan;
- 8) Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif 5 (lima) tahun;
- 9) Bersedia melepaskan jabatannya sebagai Komisaris pada BUMN/BUMD/Perusahaan, Dewan Pengawas, Pengurus Koperasi, dan/atau jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut setelah diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- 10) Tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- 11) Tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat paling kurang dalam periode 2 (dua) tahun terakhir;
- 12) Tidak pernah atau sedang menjalani hukuman pidana; dan
- 13) Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang untuk mengikuti proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

C. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan Khusus untuk Jabatan Inspektur :

- 1) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 450 atau IELTS 5,0 (masa berlaku 2 tahun);
- 2) Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bagi pelamar yang pernah/sedang menduduki Jabatan Administrator;
- 3) Telah mengikuti dan lulus Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional Tingkat Madya bagi pelamar yang pernah/sedang menduduki Jabatan Fungsional Auditor jenjang Ahli Madya;
- 4) Memiliki pengetahuan mengenai sistem pengelolaan anggaran keuangan pemerintah, proses pemeriksaan keuangan, proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- 5) Memahami pengetahuan dasar tentang rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

D. DOKUMEN ADMINISTRASI

- 1) Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dengan melampirkan pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
- 2) Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh Pelamar (sesuai dengan **Formulir Pansel PPATK-1**);
- 3) Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- 4) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Auditor Madya yang dilegalisir;
- 5) Fotokopi ijazah pendidikan formal yang dilegalisir;
- 6) Fotokopi KTP, NPWP, dan SPT Tahunan (tahun terakhir);
- 7) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun 2017 dan tahun 2018 yang dilegalisir;
- 8) Bukti telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan saat melamar;
- 9) Surat Pernyataan Pakta Integritas (sesuai dengan **Formulir Pansel PPATK-2**);
- 10) Surat Pernyataan Kesiapan Mengundurkan Diri dari Komisaris BUMN/BUMD/Perusahaan, Dewan Pengawas, Pengurus Koperasi dan/atau jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan yang dilamar (sesuai dengan **Formulir Pansel PPATK-3**);
- 11) Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik saat melamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai dengan **Formulir Pansel PPATK-4**);
- 12) Surat Pernyataan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat paling kurang dalam periode 2 (dua) tahun terakhir (sesuai dengan **Formulir Pansel PPATK-5**);
- 13) Surat Pernyataan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman pidana (sesuai dengan **Formulir Pansel PPATK-6**); dan
- 14) Surat Pernyataan persetujuan / rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang untuk mengikuti proses seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

E. TAHAPAN SELEKSI

- 1) Seleksi Administrasi;
- 2) Tes Kesehatan (*Medical Check Up*);
- 3) Seleksi Kompetensi (*Assessment Center*);
- 4) Penulisan Makalah; dan
- 5) Presentasi Makalah dan Wawancara.


F. JADWAL SELEKSI


SELEKSI JPT PRATAMA PPATK 2019 (Jabatan Inspektur)

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Seleksi	24 Juni - 12 Juli 2019
2.	Pendaftaran Peserta	25 Juni - 15 Juli 2019
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	22 Juli 2019
4.	Tes Kesehatan (<i>Medical Check Up</i>)	24 - 25 Juli 2019
5.	Seleksi Kompetensi (<i>Assessment Centre</i>)	1 - 2 Agustus 2019
6.	Penulisan Makalah	6 - 7 Agustus 2019
7.	Presentasi Makalah dan Wawancara	13 - 14 Agustus 2019
8.	Pengumuman 3 (tiga) Terbaik	20 Agustus 2019

G. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini tidak dipungut biaya apapun.
- 2) Pendaftaran Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibuka selama 15 hari kerja melalui website <https://www.ppatk.go.id>.
- 3) Hal-hal yang terkait dengan perubahan jadwal seleksi akan diberitahukan kemudian melalui website <https://www.ppatk.go.id>.
- 4) Berkas administrasi (*hardcopy*) dikirimkan ke Sekretariat Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana di Gedung PPATK, Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 35, Jakarta Pusat, paling lambat tanggal 15 Juli 2019 pukul 16.00 WIB; dan
- 5) Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi dapat menghubungi *Call Center* (021) 3850455/3853922, Senin s.d Jum'at pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

Jakarta, 24 Juni 2019
Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama, 





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1.	Nama Lengkap	:	
2.	Tempat dan Tanggal lahir	:	
3.	Alamat Tempat Tinggal / Domisili	:	
4.	Nomor Telepon / HP	:	
5.	Alamat Email	:	
6.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan*)
7.	Agama	:	
8.	Status Perkawinan	:	Belum/Menikah*)
	a. Nama Istri/Suami*)		
	b. Jumlah Anak	 Orang
9.	Riwayat Pendidikan Formal	:	a. b. dst...
10.	Pendidikan Keahlian/Profesi	:	a. b. dst...
11.	Pengalaman Pekerjaan (ditambahkan <i>achievement</i> pada setiap level jabatan dan dokumen pendukung)	:	a. b. dst....
12.	Pengalaman Organisasi (ditambahkan <i>achievement</i> pada setiap level jabatan dan dokumen pendukung)	:	a. b. dst....
13.	Pengalaman yang mendukung	:	a. b. dst....
14.	Penghargaan yang relevan yang pernah diperoleh (disertai bukti fotokopi)	:	a. b. dst....
15.	Berikan 3 (tiga) nama orang di luar keluarga, yang dapat memberikan referensi untuk anda, disertai nomor telepon yang dapat dihubungi	:	a. b. c.
16.	Sebutkan figur yang paling berpengaruh dalam karir anda dan dapat menceritakan tentang diri anda.	:	

..... 2019

Pemohon,

(nama lengkap)

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

PAKTA INTEGRITAS

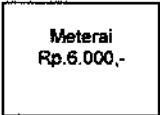
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jabatan :
Unit organisasi :
Alamat / Domisili :

Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 2. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.
- 5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... 2019



(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Tulis sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jabatan :
Unit organisasi :
Alamat / Domisili :

1. Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia **mengundurkan diri dari Komisaris BUMN/BUMD/Perusahaan, Dewan Pengawas, Pengurus Koperasi dan/atau jabatan profesi lainnya** yang berhubungan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, apabila diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar.
2. Saya bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2019



(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Tulis sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruang :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jabatan :

Unit organisasi :

Alamat / Domisili :

1. Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dengan ini menyatakan bahwa saya **tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik saat melamar***).
2. Saya bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2019

Meterai
Rp.6.000,-

(.....)
NIP.

Keterangan :

***) Tulis sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruang :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jabatan :

Unit organisasi :

Alamat / Domisili :

1. Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dengan ini menyatakan bahwa saya **tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat paling kurang dalam periode 2 (dua) tahun terakhir.**
2. Saya bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2019

Meterai
Rp.6.000,-

(.....)
NIP.

Keterangan :

**) Tulis sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruang :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jabatan :

Unit organisasi :

Alamat / Domisili :

1. Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dengan ini menyatakan bahwa saya **tidak pernah atau sedang menjalani hukuman pidana**.
2. Saya bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2019

Meterai
Rp.6.000,-

(.....)
NIP.

Keterangan :

***) Tulis sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar**